



Analysis of Marginal Group Political Participation at Banyuwangi Regency Election 2020: Study in Transvestite and Gay Communities

Analisis Partisipasi Politik Kelompok Marginal pada PILKADA Kabupaten Banyuwangi 2020: Studi pada Komunitas Waria dan Gay

Erna Agustina*, Niko Pahlevi Hentika

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

ABSTRACT

This research raises issues of political participation of marginalized groups (transvestites and gays) in regional head elections in Banyuwangi Regency in 2020. Seeing the number of transvestites and gays in Banyuwangi Regency which reached 979 people. If viewed from the number of votes, of course, they surely can influence the election results in Banyuwangi Regency. Transvestites and gays are very interesting to study, because they have high exclusivity and different ways of socializing in society in general and of course have unique political interests and expectations of public policies that benefit them. The results showed that, although transvestite and gay groups have a distinctive pattern compared to other groups of society, especially those related to their political interests. However, the political participation of gay and transvestite groups belongs to the observer group. That is, gay and transvestite groups only participate in voting in the vote only.

Keywords: Political participation, transvestites and gays, Banyuwangi Regency

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Noviyanti

Reviewed by:

Rutiana Dwi Wahyunengseh and
Akbar Pandu Dwinugraha

*Correspondence:

Erna Agustina

erna.agustina@untag-

banyuwangi.ac.id

Published: 12 September 2022

Citation:

Agustina & Niko (2022) *Analysis of Marginal Group Political Participation at Banyuwangi Regency Election 2020: Study in Transvestite and Gay Communities*.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik).

10:2.

doi: 10.21070/jkmp.v10i2.1689

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat isu partisipasi politik kelompok marginal (waria dan gay) dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Melihat jumlah waria dan gay di Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 979 orang. Jika dilihat dari jumlah suara, tentu bisa mempengaruhi hasil pemilu di Kabupaten Banyuwangi. Waria dan gay sangat menarik untuk diteliti, karena memiliki eksklusivitas yang tinggi dan cara bersosialisasi yang berbeda di masyarakat pada umumnya dan tentunya memiliki keunikan kepentingan politik dan harapan terhadap kebijakan publik yang menguntungkan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kelompok waria dan gay memiliki pola yang khas dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, terutama yang terkait dengan kepentingan politiknya. Namun, partisipasi politik kelompok gay dan waria termasuk dalam kelompok pengamat. Artinya, kelompok gay dan waria hanya berpartisipasi dalam pemungutan suara dalam pemungutan suara saja.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Waria dan Gay, Kabupaten Banyuwangi

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam sistem politiknya. Salah satu konsekuensinya adalah diadakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sejak diberlakukannya Undang-undang Pemerintahan Daerah No.23 Tahun 2014 Jo UU No.9 Tahun 2015, maka pengisian jabatan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya pemerintah membuat aturan tentang pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara bersamaan di beberapa daerah, yang jabatan Kepala Daerahnya habis masa jabatan atau biasa dikenal dengan Pilkada serentak. Salah satu daerah yang melaksanakan pemilu serentak di tahun 2020 adalah Kabupaten Banyuwangi.

Indonesia merupakan negara majemuk, yang tercipta dari berbagai ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Dengan kemajemukan tersebut, tentu saja tidak lepas dari permasalahan fenomena sosial yang beraneka ragam. Salah satu permasalahan yang muncul adalah gay dan transgender atau waria. Banyak masyarakat yang mengaggap keberadaan waria sangat mengganggu, terutama bagi kaum yang agamis menganggap waria dan gay adalah kaum pendosa, karena melakukan hubungan seks sejenis. Selain itu, masyarakat Indonesia yang masih memegang kuat norma dan adat ketimuran juga sering kali memandang keberadaan kaum gay dan waria menjadi sebuah ancaman dan bagian dari sampah masyarakat. Padahal di Kabupaten Banyuwangi sendiri sudah ada beberapa orang waria maupun gay yang berhasil menjadi orang terpandang, seperti Subari Sofyan waria yang sudah sukses membawa nama Banyuwangi sebagai duta kesenian. Selain itu juga banyak waria yang sukses menjadi penata rias dan perancang busana ternama di Banyuwangi.

Berbicara mengenai Pilkada, kelompok minoritas gay dan waria ini sebenarnya bisa dimobilisasi untuk dijadikan lumbung suara pemenangan. Hal ini terjadi karena seringkali waria menjadi pusat perhatian jika mereka mengadakan kegiatan, seperti olah raga maupun pada saat mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Tentu saja hal tersebut bisa digunakan sebagai kendaraan dalam meraih kemenangan pada Pilkada. Jumlah waria di Kabupaten Banyuwangi mencapai 187 orang dan usia rata-rata diatas 17 tahun. Sedangkan jumlah populasi komunitas gay di Kabupaten Banyuwangi mencapai 792 orang (KPA Kab. Banyuwangi, 2020).

Kelompok Gay dan Waria ini juga memiliki akses media sosial yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan, yaitu Hornet, Grinder dan Blued. Dalam media sosial bisa digunakan mereka untuk saling bertukar informasi secara tertutup dan eksklusif. Hal ini bisa dijadikan ajang kampanye yang efektif dan murah. Bahkan kelompok gay dan waria juga memiliki wadah, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelangi Laros yang mengakomodir kegiatan sosial maupun pendampingan. Sedangkan untuk kebutuhan kesehatan terutama yang bersinggungan dengan HIV AIDS, sudah ada LSM yang mendampingi yaitu Kelompok Kerja Bina Sehat atau yang biasa dikenal dengan KKBS.

Namun pada kenyataannya selama ini kelompok minoritas gay dan waria tidak pernah mendapatkan tempat untuk ikut berperan serta dalam pesta demokrasi ini. Selama ini mereka hanya menjadi penonton. Padahal jika dimobilisasi dengan baik maka kelompok minoritas gay dan waria ini dapat membantu perolehan suara.

Partisipasi Politik

Partisipasi diartikan sebagai mengambil peran atau mengambil bagian. Sedangkan partisipasi politik, yaitu mengambil peran dalam aktivitas politik. Lebih jauh penelitian yang dilakukan oleh Arniti menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan (Arnti, 2020). Senada dengan pendapat tersebut Surbakti menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Surbakti, 2007).

Partisipasi individu atau masyarakat dalam politik menurut David F. Roth & Frank L. Wilson dapat dibagi menjadi empat kelompok. Pertama, kelompok aktivis, yaitu kelompok

atau orang yang memiliki keterlibatan paling besar diantara kelompok lainnya. Kelompok ini terdiri dari pejabat partai. Kedua, partisipan yang terdiri dari anggota atau orang-orang yang berkepentingan. Ketiga, pengamat adalah mahasiswa atau pelajar serta masyarakat yang memberikan suara. Keempat, adalah kelompok apolitis, yaitu orang yang tidak peduli terhadap politik (Rakhmat, 2000).

Huntington dan Nelson dalam Sahid menjelaskan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik yang terbagi dalam beberapa jenis. Pertama adalah kegiatan pemilihan, yaitu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menjadi calon, pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Kedua, lobbying adalah pertemuan dengan pejabat-pejabat partai dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap keputusan yang diambil. Ketiga, Kegiatan organisasi, bentuk partisipasi ini menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, *contacting* atau mencari koneksi, yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya seorang atau beberapa orang (Sahid, 2011).

Selanjutnya, individu atau masyarakat dalam berpartisipasi politik tentu terdapat faktor-faktor yang mendorong mereka untuk ikut bergerak dalam politik. Tentu masyarakat mempunyai alasan mengapa mereka mau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk terjun dalam perpolitikan yang selanjutnya ada konsekuensi positif dan negatif bagi mereka. Weimar dalam (Sastroatmojo, 1995), mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi individu atau masyarakat untuk ikut dalam berpolitikan, diantara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Modernisasi industrialisasi menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas esensial, artinya munculnya kelas menengah dan pekerja baru .
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa, sehingga ide-ide nasionalisme disampaikan lewat media massa (buku, koran dan media lain) dapat membangkitkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik sehingga masing-masing kubu mencari massa untuk memenangkan konflik.
5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah dapat merangsang tumbuhnya tuntutan. Contoh: rencana pembangunan tol

Surbakti dalam (Sahid, 2011) juga menyatakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam partisipasi politik, diantaranya:

1. Aspek kesadaran politik seseorang, artinya kesadaran terhadap hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapat jaminan sosial. Selain itu juga kesadaran terhadap kewajiban warga negara.
2. Bagaimana penilaian terhadap pemerintah. Apakah pemerintah dinilai berhasil yang selanjutnya akan diapresiasi atau pemerintah dianggap gagal yang menyebabkan rakyat kecewa.

Arbi Sanit dalam (Sahid, 2011) juga mempunyai pendapat tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya partisipasi politik, diantaranya:

1. Adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang
2. Adanya kenyataan berpolitik secara luas terbuka
3. Adanya keleluasaan untuk mengkoordinasi diri. Artinya, munculnya kebebasan berkumpul dan berpendapat
4. Adanya penyebaran sumber daya politik, dalam artian kekayaan
5. Adanya distribusi kekuasaan di masyarakat. Artinya, era reformasi sekarang lebih memungkinkan siapapun untuk bisa memiliki jabatan dalam posisi legislatif atau eksekutif. Sehingga apabila rakyat tidak puas dengan pemimpin yang ada, maka mereka berinisiatif untuk berperan dalam politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif karena peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi politik kelompok marginal gay dan waria pada PILKADA Tahun 2020 di Kabupaten Banyuwangi. Lokasi penelitian yang diambil berada di Kabupaten Banyuwangi. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok marginal adalah kelompok yang mempunyai perilaku yang menyimpang dibandingkan dengan perilaku masyarakat pada umumnya. Sehingga kelompok gay dan waria tergolong kelompok marginal. Dalam Pilihan Bupati tahun 2020 di Kabupaten Banyuwangi kelompok gay dan waria hanya berperan dalam hal pencoblosan saja. Mereka tidak melakukan gerakan-gerakan lain untuk lebih aktif dalam pemilihan bupati, seperti ikut membantu kampanye dalam salah satu calon ataupun dalam penggalangan dana kampanye.

Jika hal ini dikaitkan dengan pendapat David F. Roth & Frank L. Wilson dalam (Rakhmat, 2000) yang membagi partisipasi politik menjadi empat kelompok. Pertama aktivis, yaitu kelompok atau orang yang memiliki keterlibatan paling besar diantara kelompok lainnya. Kelompok ini terdiri dari pejabat partai. Kedua, partisipan yang terdiri dari anggota atau orang-orang yang berkepentingan. Ketiga, pengamat adalah mahasiswa atau pelajar serta masyarakat yang memberikan suara. Keempat, adalah kelompok apolitis, yaitu orang yang tidak peduli terhadap politik. Maka, partisipasi kelompok gay dan waria tergolong dalam kelompok pengamat, dimana kelompok gay dan waria hanya berpartisipasi dalam pemberian suara dibalik suara saja.

Sebenarnya ini sangat disayangkan mengapa kelompok gay dan waria tidak melakukan partisipasi yang lebih dalam moment pilihan bupati tahun 2020 tersebut. Apalagi jumlah gay di Banyuwangi sekitar 792 orang dan waria sekitar 187 orang, tentu ini bukan angka yang kecil, belum lagi jika diakumulasikan dengan jumlah keluarga terdekat yang bisa mereka pengaruhi dalam bilik suara untuk mencoblos calon tertentu.

Kelompok waria dan gay seharusnya dapat berpartisipasi lebih dalam Pemilihan Bupati. Mereka secara kelompok harusnya memiliki aspirasi dan kepentingan yang khas pula dibandingkan dengan anggota masyarakat yang lain, misalnya terkait stigmatisasi negatif terhadap gay dan waria dalam masyarakat, pengakuan kesetaraan dan lain sebagainya. Dengan mendukung dan membantu kampanye salah satu calon bupati misalnya, mereka bisa menitipkan aspirasi yang akan diimplementasikan dalam bentuk program atau peraturan daerah yang pro dengan kelompok gay dan waria.

Selanjutnya, kelompok gay dan waria ketika ditanya tentang ketidakaktifan mereka, mereka menjawab bahwa kebanyakan mereka sudah sibuk bekerja. Jika dianalisis lebih jauh sebenarnya alasan ini kurang kuat. Jika dibandingkan misalnya, dengan kelompok buruh, yang walaupun mereka juga sehari-hari bekerja dan sudah sibuk dengan keluarga masing-masing. Namun, kelompok buruh selama ini terkenal aktif dalam partisipasinya di dunia politik melalui berbagai bentuk partisipasi. Baik dalam kegiatan pemilihan, yaitu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menjadi calon, pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Lobbying atau pertemuan dengan pejabat-pejabat partai dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap keputusan yang diambil. Kegiatan organisasi yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Atau pun, contacting atau mencari koneksi untuk memperoleh manfaat bagi kelompok (Sahid, 2011).

Oleh karena itu, alasan kelompok gay dan waria belum banyak berpartisipasi karena masing-masing individunya sibuk bekerja, masih lemah. Untuk menjawab hal ini dapat dirujuk pendapat Surbakti dalam (Sahid, 2011) yang mengemukakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam partisipasi politik, diantaranya:

1. Aspek kesadaran politik seseorang, artinya kesadaran terhadap hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapat jaminan sosial. Selain itu juga kesadaran terhadap kewajiban warga negara.
2. Bagaimana penilaian terhadap pemerintah. Apakah pemerintah dinilai berhasil yang selanjutnya akan diapresiasi atau pemerintah dianggap gagal yang menyebabkan rakyat kecewa.

Pendapat Surbakti tersebut tampaknya lebih logis untuk menjelaskan mengapa kelompok marginal gay dan waria belum aktif dalam perpolitikan. Terutama aspek kesadaran politik seseorang atau kelompok terhadap hak politiknya. Jika individu atau kelompok sudah sadar akan hak-hak politiknya yang disana terkandung aspirasi dan kepentingan politik, maka mereka akan mau lebih aktif dalam berpartisipasi politik. Apalagi dalam moment pilihan bupati di Kabupaten Banyuwangi yang hanya diikuti oleh dua calon. Tentu akan lebih mudah menilai mana calon yang akan respect terhadap kepentingan gay dan waria jika dilakukan komunikasi dan diskusi yang lebih intensif.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait partisipasi politik kelompok marjinal (komunitas waria dan gay) pada Pilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi kelompok gay dan waria tergolong dalam kelompok pengamat, dimana kelompok gay dan waria hanya berpartisipasi dalam pemberian suara dibilik pencoblosan saja.

PENDANAAN

Pendanaan penelitian dan artikel ini diperoleh dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi karena atas dukungannya sehingga tulisan ini dapat dipublikasikan di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

REFERENCES

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 328–348.
- Damayanti, R., Gustomy, R., & Haboddin, M. (2017). Demokrasi di Malang Menggali Kontribusi Masyarakat Sipil Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 2(1).
- KPA Kabupaten Banyuwangi. (2020). Data Mapping di Kabupaten Banyuwangi. Tidak dipublikasikan
- Noor, M., Hairunnisa., & Ghufro. (2019). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dalam Meningkatkan Komunikasi Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilu 2019. *Jurnal Penelitian pers dan Komunikasi Pembangunan*, 23 (2).
- Rakhmat, J. (2000). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Ghalia Indonesia.
- Santoso, S. & Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sastroatmojo, S. (1995). *Profil Budaya Politik*. IKIP Semarang Pres.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widisarana Indonesia.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Erna Agustina & Niko Pahlevi. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.